

Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional

Fahmi Irhamsyah¹

Peneliti PUSPOL Indonesia (Pusat Studi Sosial dan Politik)

Abstrak

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No 59 Tahun 2017 telah berkomitmen untuk turut serta bersama PBB menyukseskan komitmen global dalam rangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Saat pemerintah Indonesia fokus dalam implementasi SDGs, negeri ini juga mendapatkan bonus demografi dengan perkiraan angka produktif yang akan menyentuh 67% dan sangat potensial untuk memajukan bangsa sebagai implementasi dari kepentingan nasional. Disaat bersamaan, tantangan dan ancaman bagi ketahanan nasional yang muncul dari kondisi sosial politik serta ekonomi pada tataran global, regional dan nasional ada di hadapan bangsa Indonesia. Artikel ini akan mengulas bagaimana posisi SDGs yang merupakan agenda global, kepentingan nasional indonesia dalam SDGs, serta dampaknya bagi ketahanan nasional.

Kata kunci : SDGs, kepentingan nasional, ketahanan nasional



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

ilustrasi: <http://umazerbaijan.org>

PENDAHULUAN

SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, perlu kiranya memandang negara lain termasuk PBB juga sebagai “masyarakat negara”. Menurut Robert Jackson, memahami masyarakat negara bukanlah suatu permasalahan tentang pemakaian model-model ilmu sosial, melainkan, suatu permasalahan tentang menjadi akrab dengan sejarah dan mencoba sedekat mungkin untuk menguasai pengalaman praktisi masa lalu dan hari ini.² Oleh karena itu, perlu memahami suatu program global dari sisi historis, mengapa program tersebut muncul ke permukaan.

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sejak memasuki tahun 2000 telah mencanangkan program MDGs untuk kurun waktu 2000 hingga 2015. Sejak 2016 hingga tahun 2030, PBB kembali mencanangkan

program SDGs. Sebagai bagian dari PBB, Indonesia bersama 192 negara lainnya turut serta mengadopsi SDGs sebagai program pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 telah turut serta berkomitmen untuk menyukseskan SDGs. Wakil Presiden Indonesia H.M. Jusuf Kalla dalam pembukaan SDGs Annual Conference di Jakarta menyatakan bahwa program ini penting sebagai konsekuensi global. Menurutnya “Dunia telah lama melaksanakan globalisasi. Karena itu maka dunia mempunyai tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kehidupan kemasyarakatan, kemakmuran dan juga hal-hal yang baik bagi keluarga seluruh dunia”³

Jusuf Kalla juga menyatakan “Jika masyarakat bisa berbeda dalam urusan politik, maka tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs. Pen) menjadi pemersatunya”. SDGs dalam konteks

ketahanan Nasional dapat menjadi perekat dan pemersatu kepentingan nasional. Sebab seluruh masyarakat tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan preferensi politiknya tentu menginginkan peningkatan kualitas hidup di masa depan. Agar hasil SDGs dapat optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, maka seluruh elemen negara baik pemerintah, rakyat, *Third Sector* termasuk di dalamnya NGO dan segenap pemerhati serta praktisi Ketahanan Nasional harus hadir untuk memahami dan turut serta berkontribusi menyukseskan program jangka panjang ini.

PEMBAHASAN

Indonesia telah turut serta bersama negara lainnya untuk menyukseskan MDGs. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sebanyak 70% program dan tujuan MDGs telah terlaksana dan dicapai oleh Indonesia⁴. Hal ini tentu menggembarakan dan akan mempengaruhi pandangan internasional terhadap kepemimpinan nasional. Sebagai program lanjutan dari MDGs, SDGs memiliki *goals* atau tujuan yang lebih variatif dan indikator keberhasilan yang lebih kompleks. Jika MDGs hanya mencantumkan 8 goals, maka SDGs memiliki 17 tujuan atau *goals* yang harus dicapai. Diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun

Kemiskinan didefinisikan sebagai proporsi pendapatan rata-rata penduduk dengan pertimbangan kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*) berada kurang dari 1,25\$

Amerika per hari. Oleh karenanya pemerintah memiliki kewajiban agar setiap warga negara memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan hak untuk menikmati standar kehidupan yang layak serta berupaya mengentaskan kemiskinan dengan program-program jaminan sosial.

2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai ketahanan Pangan dan Gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Indikator tujuan kedua ini disepakati dengan menggunakan skema PoU (*Prevalence Of Undernourishment*) sehingga ketahanan pangan bagi masyarakat dapat di ukur dengan *Undernourishment* atau ketidakcukupan pangan. Apakah seorang warga negara secara reguler telah mampu mengkonsumsi makanan untuk dapat hidup normal, sehat dan aktif?

Ketahanan pangan bagi sebuah bangsa akan berimplikasi pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa yang akan datang. Sebab konsumsi makanan yang tidak berkualitas akan mempengaruhi gizi anak-anak. Khusus pada balita, maka dapat menyebabkan terjadinya Stunting dan akan mempengaruhi kondisi fisik bangsa Indonesia ke depan, sebab stunting dapat mempengaruhi tidak hanya tinggi badan Balita (badan menjadi pendek dan sangat pendek) namun juga dapat mempengaruhi mental, emosional dan perkembangan otak. Beberapa studi bahkan menyatakan bahwa anak Stunting memiliki resiko

lebih besar untuk terkena penyakit menular.

3. **Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk seluruh usia**

Kesehatan dan kesejahteraan merupakan dua variabel yang mengikat dan saling mempengaruhi satu sama lain pada diri tiap warga negara. Oleh karenanya negara harus menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga negara dan melakukan upaya-upaya preventif agar masyarakat tidak terpapar berbagai penyakit menular. Perizinan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia harus memperhatikan Amdal, sanitasi serta dampak sosialnya bagi masyarakat sekitar.

Bagian terpenting dari tujuan besar ini adalah memerangi penyalahgunaan Narkoba serta penjualan atau bisnis narkoba dilindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu penjagaan di berbagai kawasan perbatasan harus sangat maksimal, mengingat saat ini Indonesia memiliki angka pemuda dan usia produktif yang terus meningkat hingga tahun 2030.

4. **Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua**

Pemerintah berupaya menciptakan pendidikan yang berkualitas diseluruh wilayah Indonesia sehingga mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul. Skema Zonasi sekolah

yang tengah dicanangkan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah suatu upaya positif untuk mengurangi disparitas dan label sekolah favorit dengan sekolah non favorit sehingga ke depan seluruh sekolah berhak memiliki kualitas yang sama baiknya dan seluruh siswa dapat bersekolah pada lokasi terdekat dari tempat tinggal dengan kualitas yang tidak jauh berbeda satu sama lain.

Kesempatan belajar sepanjang hayat adalah implementasi dari Undang-undang yang mewajibkan wajib belajar Sembilan tahun. Negara menjamin seluruh warga negara untuk dapat mengakses pendidikan berkualitas dengan dukungan penuh negara sehingga keluarga dengan berbagai latar belakang ekonomi dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas.

5. **Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**

Akses Pendidikan dan Pekerjaan sejatinya menjadi kodrat kemanusiaan yang dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang gender. Oleh karenanya, sebagaimana kaum pria yang dapat mengakses pendidikan tinggi dan pekerjaan yang layak, maka kaum perempuan juga memiliki peluang dan kesempatan yang sama.

Negara harus hadir agar tidak terjadi diskriminasi terhadap hak-hak kaum perempuan, sebagaimana negara harus hadir pada ketidakadilan yang muncul dari ketidakfahaman warga masyarakat tentang studi gender.

6. **Ringkasan tujuan ke- 6 hingga 17 ada**

pada tabel berikut.



Kepentingan Nasional dalam SDGs

SDGs sebagai agenda global perlu disinkronisasi dengan kepentingan nasional, sebab kondisi sosial, ekonomi dan demografi tiap negara berbeda satu sama

lain. Pemerintah Indonesia telah memiliki Nawa Cita sebagai agenda dan kepentingan nasional. Untuk itu perlu kiranya sinkronisasi antara nawa cita dengan SDGs sebagai berikut.

Nawa Cita	SDGs
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara	Goal 3,10, 16,17
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Goal 16
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan	Goal 1-11
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Goal 14-16
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	Goal 1-6
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	Goal 1-10
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic	Goal 1-5, 8, 9 dan 12-15
8. Melakukan Revolusi Karakter bangsa	Goal 3-4 dan 11
9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Goal 5, 10, 16, 17.



Daya dukung pencapaian tujuan nasional memasuki tahun 2019 mengalami penambahan dari sisi kuantitas disebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan puncaknya diproyeksikan Indonesia akan mengalami bonus demografi. Hal ini tentunya sejalan dengan salah satu poin dalam asas ketahanan nasional, yaitu asas mawas keluar. Asas mawas ke luar secara teoritis bertujuan untuk dapat mengantisipasi ancaman dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Asas Mawas keluar dibutuhkan untuk menjamin kepentingan nasional, sehingga kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional agar memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.⁵

Dasar saling menguntungkan harus ditinjau dari sisi kepentingan nasional, sehingga kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama. Dalam konteks Implementasi SDGs yang merupakan agenda global, pemerintah perlu menyesuaikan dengan agenda dan kepentingan nasional terlebih dahulu. Tidak berlaku sebaliknya, kepentingan nasional mengikuti kepentingan global. Sebab pemerintah Indonesia tentu paling memahami karakter dan kebutuhan rakyat.

Bonus Demografi dan Ketahanan Nasional

Seiring dengan implementasi SDGs, Indonesia memiliki peluang yang lebih

besar untuk mencapai SDGs jika ditinjau dari sisi demografi dunia. Sebagian besar negara-negara dunia mulai mengalami krisis demografi dengan angka kelahiran yang terus menurun. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) yang didirikan di University of Washington pada tahun 2018 mengemukakan bahwa meski populasi penduduk dunia meningkat dari 2,6 miliar pada tahun 1950 menjadi 7,6 miliar pada tahun 2018, namun terjadi tingkat pertumbuhan yang tidak seimbang jika ditinjau dari sisi geografi dan wilayah. Hal ini disebabkan sebanyak 91 negara, terutama di benua Eropa dan Amerika mulai mengalami tingkat pertumbuhan penduduk yang terus menurun.⁶

Berbeda dengan peta demografi Eropa dan Amerika, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2019 ini diproyeksikan kelompok usia produktif akan mencapai 67% dari total populasi penduduk⁷ dengan capaian angka produktif menyentuh 91 juta jiwa dari total masyarakat Indonesia. Angka ini tentu sangat besar untuk dioptimalkan demi kemajuan bangsa, namun kewaspadaan nasional tetap harus ada karena ancaman pada generasi Millennial dan generasi Z di Indonesia terus meningkat.

Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen. Pol. Arman Depari menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang sangat serius bukan karena jumlah kasus yang terus meningkat, namun karena generasi millennial yang menjadi sasaran⁸. Narkoba kini menjadi ancaman serius yang perlu

disikapi dengan koordinasi antar seluruh elemen Pertahanan, Keamanan maupun lembaga sipil lainnya. Konsep perang candu sepanjang sejarah sejatinya masih menjadi konsep peperangan yang efektif untuk menghancurkan suatu bangsa, oleh karenanya penting wilayah perbatasan Indonesia khususnya yang menjadi gerbang masuk dan beririsan dengan perbatasan negara lain di jaga dengan pengamanan optimal sebab implikasinya akan sangat mempengaruhi kualitas SDM Indonesia di masa yang akan datang.

Ancaman dari dalam negeri juga perlu diwaspadai, diantaranya adalah ancaman meningkatnya jumlah pengangguran sebab di masa yang akan datang, banyak jenis-jenis profesi yang hari ini ada akan hilang dan tergantikan dengan munculnya profesi-profesi jenis baru. Tindakan preventif terhadap hal ini adalah dengan mendorong berubahnya paradigma pada sektor pendidikan. Seiring dengan kebutuhan revolusi industri 4.0., kurikulum pendidikan harus mulai beralih dari penggunaan taksonomi Bloom yang meletakkan kemampuan evaluasi sebagai puncak kecerdasan harus beralih pada taksonomi Anderson yang meletakkan Kreativitas sebagai puncak kecerdasan.

Salah satu residu dari Revolusi Industri 4.0 adalah hilangnya banyak profesi hari ini dan bermunculan jenis-jenis profesi baru di masa yang akan datang. Potensi hilangnya banyak profesi di masa yang akan datang tentu harus menimbulkan kewaspadaan nasional karena berpotensi terjadi krisis horizontal di masyarakat, namun disisi lain Industri kreatif sangat berpeluang untuk muncul. Pada titik ini penting bagi seluruh

elemen bangsa untuk mendukung kreatifitas anak bangsa.

Berdasarkan seluruh fenomena global, kepentingan nasional, dan ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, maka studi ketahanan nasional sudah saatnya ditingkatkan kembali. Lebih dari itu, pemangku kebijakan harus mulai menciptakan kebijakan-kebijakan strategis agar ketahanan nasional dapat masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai bagian integral untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air pada segenap generasi Millennial dan generasi Z agar “bonus demografi” betul-betul mampu menjadi bonus bagi kepentingan bangsa, bukan menjadi “petaka demografi” karena muncul generasi dengan kuantitas yang banyak namun minim kualitas.

PENUTUP

Kesimpulan

1. SDGs sebagai agenda Global harus disikapi dengan bijak, karena terdapat sebuah adagium bahwa sebagai bangsa “kita perlu berfikir global dan bertindak lokal” *Think Globally and Act Locally*”.
2. Untuk memastikan SDGs berjalan dalam koridor kepentingan nasional, maka salah satu instrument yang perlu diperkuat adalah Studi mengenai Ketahanan Nasional. Studi ini menjadi penting sebab dalam pelaksanaan SDGs, Indonesia berbeda dengan negara lain. Indonesia akan juga memasuki bonus Demografi disaat banyak negara mulai mengalami krisis bahkan stagnansi Demografi. Maka, menjadi kebutuhan mendasar jika Generasi Millennial dan Generasi Z yang akan memegang



estafet kepemimpinan nasional di masa yang akan datang sudah mulai mempelajari dengan baik studi ketahanan nasional sejak di bangku sekolah maupun Universitas sehingga SDGs dapat tercapai, kepentingan nasional dapat tercapai dan Ketahanan Nasional dapat berperan maksimal untuk mencetak pemimpin unggul yang mampu memajukan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Saran

1. Sebagai bentuk optimalisasi SDGs dan menjaga kualitas generasi muda dalam menjawab tantangan masa depan, perlu strategi pembinaan ketahanan nasional melalui jalur pembinaan keluarga dan jalur pembinaan pendidikan formal. pendekatan persuasif dan promotif perlu diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan nasional.
2. Bidang-bidang studi yang memiliki relevansi secara khusus dengan studi ketahanan nasional harus diperhatikan secara serius sehingga kelak akan terbentuk pelajar, mahasiswa dan pemuda Indonesia seutuhnya yang memiliki wawasan nasional serta mampu memikul tanggung jawab kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Said Ali, dkk. 2016. *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Epstein, Richard A., 2006. *Skeptisisme dan Kebebasan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Anderson and Krathwohl David. 2001. *A Taxonomy for learning teaching and Assessing*. New York : Longman.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Botturi, Luca, 2008. *Instructional design : Theories and practies*. New York : IGI Publishing.

Hasan, Said Hamid., 2012 . *Pendidikan Sejarah Indonesia Isu dalam Ide dan Pembelajaran*. Bandung : Rizqi Press.

Levesque, Stephane. *Thinking Historically*. Canada : University of Toronto Press, 2008.

Osborn, Alex Abridged by Robert W. Galvin. *Your Creative Power*. Maryland: Hamilton books, 2009.

Internet :

<https://nationalgeographic.grid.id/read/13997295/studi-ada-ketidakseimbangan-populasi-di-negara-maju-dan-berkembang?page=all>

https://www.bappenas.go.id/files/5015/1366/8275/Outlook_Pembangunan_Indonesia_2018

[Pemanfaatan Bonus Demografi.pdf](#)

<http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/06/bnn-bilang-narkoba-kini-menyasar-generasi-milenial-waspadalah>

Endnotes

- 1 Fahmi Irhamsyah, M.Pd, C. Mt adalah alumnus Jurusan Sejarah pada sekolah Pascasarjana UNJ. Saat artikel ini ditulis ia menjabat sebagai wakil direktur IGBS Darul Marhamah. Selain di lembaga pendidikan, ia aktif juga sebagai peneliti di PUSPOL Indonesia (Pusat Kajian Sosial dan Politik). Fahmi pernah memperoleh beasiswa untuk mengikuti program ROOTS (Roadmap Of Outstanding Educators) di Malaysia dan pendalaman bahasa arab dari LIPIA (AL Imam Ibnu Saud, Riyadh, Saudi Arabia). Pada tahun 2018 ia diundang sebagai peserta SDGs Annual Conference BAPENNAS RI.
- 2 Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) hal. 182
- 3 Catatan Penulis dalam SDGs Annual Conference di Jakarta akhir tahun 2018
- 4 Ali Said, dkk., *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia* (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2016) hal. 3
- 5 Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. *Geopolitik Indonesia dan Ketahanan Nasional* (Jakarta, Lemhannas RI, 2019) hal. 61
- 6 <https://nationalgeographic.grid.id/read/13997295/studi-ada-ketidakseimbangan-populasi-di-negara-maju-dan-berkembang?page=all>



[ju-dan-berkembang?page=all](#) diunduh pada 18 Juni 2019

- 7 https://www.bappenas.go.id/files/5015/1366/8275/Outlook_Pembangunan_Indonesia_2018_Pemanfaatan_Bonus_Demografi.pdf diunduh pada 17 Juni 2019
- 8 <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/06/bnn-bilang-narkoba-kini-menyasar-generasi-milenial-waspadalah> diunduh pada 17 Juni 2019